

BAB I

PENDAHULUAN

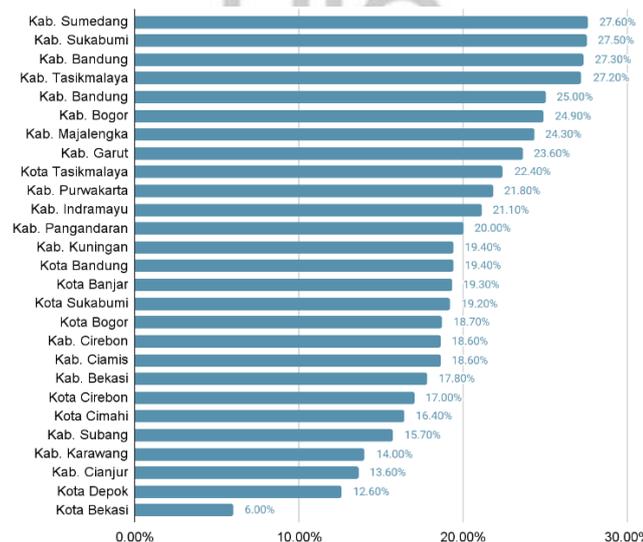
1.1 Latar Belakang Penelitian

Stunting adalah permasalahan serius akibat defisiensi gizi kronis yang timbul karena kurangnya asupan nutrisi dalam periode yang panjang (Wayan, Ekayanthi, & Suryani, 2019). Tanda-tanda stunting bisa muncul sejak janin masih dalam kandungan dan hanya terlihat ketika anak mencapai usia 2 tahun (Kementerian Kesehatan, 2016). Berbagai faktor seperti kemiskinan, tingkat pengetahuan, pola asuh anak, bencana alam, ketersediaan makanan yang rendah, serta pelayanan kesehatan yang terkait dengan masalah kebijakan ekonomi dan politik di suatu negara merupakan penyebab utama stunting. Faktor-faktor ini pada akhirnya berdampak pada kurangnya asupan gizi anak balita dan peningkatan risiko penyakit infeksi (Kementerian Kesehatan, 2020).

(Yun, Rosidi, & Kadir, 2022) Persoalan gizi ini pada Negara Indonesia saat ini sedang hangat dibicarakan, hal ini dapat dilihat dari adanya permasalahan pembangunan manusia masih dianggap sebagai masalah utama dalam tatanan masyarakat khususnya di negara miskin dan juga di negara berkembang. Persoalan gizi yang sering dialami pada masyarakat yaitu permasalahan pada bayi yang mengalami masalah tubuh yang terlalu pendek atau masalah ini biasa disebut stunting. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang membahas terkait tentang percepatan penurunan angka stunting. Stunting merupakan sebuah gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak akibat dari adanya kekurangan gizi yang kronis dan sifatnya sudah berulang-ulang sehingga

menyebabkan adanya infeksi berulang, biasanya hal ini ditandai dengan adanya tinggi badan pada anak berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh menteri pemerintahan pada Bidang kesehatan. Menurut WHO (World Health Organization), stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak-anak akibat adanya gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang kurang memadai.

Program pemerintahan sekarang ini sudah memfokuskan dalam masalah stunting sebagai isu utama yang berprioritas sifatnya nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu sebagai tahapan pada bagian pembangunan yang sifatnya jangka waktu menengah nasional pada periode 2020 sampai 2024 dengan target dalam penurunan yang harus memiliki progres signifikan dari masalah yang berawal pada tahun 2021 dengan angka 24,4% dan pada tahun 2024 menjadi 14%.



Gambar 1.1 Prevalensi Stunting Jawa Barat

Dalam beberapa tahun terakhir, prevalensi masalah stunting di Kabupaten Subang mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu sebanyak 15,70%. Angka ini mencerminkan proporsi anak-anak di bawah usia lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan secara kronis. Stunting dapat mempengaruhi kualitas hidup, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa dewasa, sehingga menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga mencerminkan aspek sosial dan ekonomi yang kompleks. Dampak jangka panjang dari stunting dapat membawa konsekuensi serius terhadap kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Subang. Oleh karena itu, penanganan prevalensi stunting perlu menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Subang.

Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dirancang untuk meningkatkan nutrisi pada anak-anak yang mengalami masalah pertumbuhan dan perkembangan. Program ini melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi gizi anak-anak melalui makanan sehat yang disiapkan oleh tim pendamping keluarga (TPK) (Riu & Bunsal, 2021). Konsep BAAS adalah setiap donatur memberikan bantuan finansial kepada anak-anak yang terkena stunting dan berasal dari keluarga kurang mampu. Dana tersebut digunakan oleh TPK untuk menyediakan makanan sehat dengan nutrisi seimbang, sehingga target penurunan stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai (Wijayanti dkk, 2022).

Dalam rangka mencapai target Program Bapak Asuh Anak stunting, penurunan sebesar 14% Pada Tahun 2024, Program BAAS harus terus diperkuat

dan diperluas. Upaya penggalangan dana dan partisipasi donatur perlu ditingkatkan guna memastikan kelancaran pelaksanaan program ini. Selain itu, pelibatan lebih banyak keluarga yang membutuhkan dukungan juga perlu diperluas agar dampak positif program dapat dirasakan oleh lebih banyak anak yang mengalami stunting.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Subang tidak dapat dicapai secara optimal tanpa penanganan serius terhadap masalah stunting. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, lembaga pemerintah, dan pihak terkait menjadi krusial dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan memahami dan mengidentifikasi akar permasalahan prevalensi stunting, diharapkan dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kondisi gizi masyarakat Kabupaten Subang.

Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) menjadi salah satu inisiatif pemerintah daerah untuk mengajak aktif keterlibatan birokrasi, terutama dalam mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting di masyarakat. Karena penanganan stunting memerlukan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak, pilihan untuk menerapkan tata kelola kolaboratif dianggap sebagai opsi yang relevan.

Inisiatif BAAS, yang diperkenalkan oleh BKKBN, bertujuan untuk menghapuskan kasus stunting dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat untuk mengurangi prevalensi stunting, terutama di daerah masing-masing (BKKBN, 2022). Program ini difokuskan pada keluarga dengan anak-anak berisiko stunting, khususnya dari kalangan masyarakat kurang mampu. Peluncuran BAAS

diikuti dengan penyebaran Surat Edaran (SE) dari Kepala BKKBN Nomor 560.a/HL.01.01/G2/2022, tanggal 7 Juni 2022, yang mengajak dan mendorong mitra untuk terlibat sebagai Bapak Asuh Anak Stunting. Berdasarkan hal tersebut, Bupati Subang pada bulan Agustus 2022 mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor PA.03.01/KEP.380-DP2KBP3A/2022 tentang Pembentukan Tim Bapak Asuh Anak Stunting.

Tugas utama Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) melibatkan:

Memberikan bantuan langsung kepada balita stunting, seperti

- a. Penyediaan makanan tambahan berupa produk lokal yang kaya gizi dan protein.
- b. Memberikan pendampingan dalam bentuk komunikasi informasi dan edukasi kepada kelompok sasaran, fasilitasi janjian sehat, penyediaan air bersih, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan bantuan lainnya sesuai kebutuhan untuk mempercepat penanganan stunting.

Pemerintah Indonesia merespons masalah stunting dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Inisiatif ini, pertama kali diperkenalkan pada 2018, bertujuan mengurangi prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Kementerian/Lembaga bertanggung jawab, dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) berfokus pada keluarga berisiko stunting. PerPres juga membentuk Tim Percepatan Pemangkasan Stunting yang dipimpin Wakil Presiden, dengan Tim serupa di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Tim serupa juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Sejalan dengan upaya

tersebut, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mencapai target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Pada Tingkat Kedua, Pemerintah Jawa Barat Telah membuat peraturan yaitu menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, yang menandakan langkah serius dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah. Upaya ini menjadi semakin penting mengingat Jabar Zero New Stunting menjadi program unggulan Gubernur Jawa Barat yang ambisius, dengan target capaian pada tahun 2023 sebesar 19,2 persen. Pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dengan mengeluarkan peraturan dan mengajak lembaga non-pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan organisasi filantropi untuk berkolaborasi dalam program ini. Melalui kerja sama lintas sektor, diharapkan penelitian, inovasi, dukungan finansial, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dapat mencapai penurunan stunting yang merata di seluruh Jawa Barat.

Selanjutnya Pada tingkat dibawah Gubernur Jawa Barat, Kabupaten Subang mengambil langkah proaktif dengan menerbitkan Peraturan Bupati No.89 Tahun 2019 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Subang. Keputusan ini muncul karena adanya kesadaran akan dampak negatif stunting terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia. Dengan masih adanya balita yang mengalami stunting, menjadi jelas bahwa tindakan segera diperlukan untuk mencegah dampak jangka panjang yang mungkin menghambat kemajuan daerah.

Peraturan ini menegaskan perlunya keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Subang. Dokumen kebijakan ini bukan hanya sebagai pedoman, melainkan sebagai dasar untuk tindakan konkret yang melibatkan seluruh komunitas dalam membangun masa depan yang lebih sehat dan tangguh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Upaya Perbaikan Gizi pada Bab II pasal 28 Ayat 1&2, disampaikan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan dan fasilitasi program gizi di tingkat kabupaten/kota. Tanggung jawab ini mencakup penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi keluarga dan masyarakat, pemenuhan kebutuhan gizi pada keluarga miskin, rawan gizi, serta dalam situasi darurat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi serta menyelenggarakan pelayanan untuk perbaikan status gizi.

Melihat faktor-faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya Stunting, maka penanganan permasalahan Stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi berisiko Stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai

dampak nyata dengan menurunnya angka prevalensi Stunting 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting serta memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kedua, target Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Di samping itu upaya percepatan penurunan Stunting ini akan mempunyai multiplier effect terhadap peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang juga merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan target 3.1 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, serta 3.2 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita.

Target Penurunan Stunting Melalui Program Bapak Asuh Anak Stunting Tahun 2024 adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Subang Yaitu :

Tabel 1.1 Sasaran, Indikator, Target, Program Bapak Asuh Anak Stunting

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
Tersedianya Layanan Intervensi Spesifik.	a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90

	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	80
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	58
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	80
	e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	80
	f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	90
	g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90
	h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90
	i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90
Tersedianya Layanan Intervensi Sensitif.	j. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	100

k. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	90
l. Cakupan bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan (juta)	112,9
m. cakupan keluarga beresiko stunting yang memperoleh pendampingan persen	90
n. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat juta.	112,9
o. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	70
p. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan juta	15,6
q. Persentase desa atau kelurahan stop buang air besar sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	90

Kebijakan publik, sebagai langkah mengendalikan manajemen keuangan, sumber daya alam, dan tenaga manusia untuk kepentingan umum, merupakan hasil dari kolaborasi, kesepakatan, dan persaingan antar gagasan serta kepentingan politik di suatu negara. Kebijakan ini tidak hanya sebagai instrumen pemerintahan, tetapi juga mencakup manajemen sumber daya umum. Dalam konteks pertumbuhan

nasional, kebijakan publik menjadi landasan penting, tanpa kebijakan yang mendukung, sistem pembangunan di Indonesia tidak dapat berkembang dengan jelas. Evaluasi tetap diperlukan setelah kebijakan diberlakukan untuk memastikan efektivitasnya.

Evaluasi kebijakan adalah bagian dari proses kebijakan publik dan merupakan cara untuk mengevaluasi efektivitas program atau kebijakan. Langkah-langkah dalam proses pengambilan kebijakan, seperti pengesahan, implementasi, dan tahapan lainnya, juga mencakup evaluasi. Dampak positif dan negatif terhadap produktivitas target kebijakan mungkin timbul dari tinjauan kebijakan.

Dinas Kesehatan berperan sebagai badan pelaksana pemerintah di sektor kesehatan serta dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah otoritas Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Dinas Kesehatan adalah melaksanakan sebagian tugas daerah yang berkaitan dengan kesehatan guna mendukung kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesehatan serta memberikan bantuan sesuai dengan bidangnya.

Pelayanan publik mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan berbagai jenis pelayanan publik.

Di Subang, upaya untuk mengatasi masalah stunting telah menjadi fokus perhatian, dengan banyak bapak asuh anak stunting yang turut berkontribusi. Salah satu contoh yang menginspirasi adalah seorang pejabat eselon 3 ditunjuk sebagai bapak asuh untuk anak-anak yang mengalami stunting. Keberanian dan

kepedulian pejabat tersebut tercermin dalam kemauannya untuk menyisihkan dana sesuai dengan kehendak dan kemampuannya. Tindakan ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang mengalami stunting, tetapi juga menunjukkan semangat gotong royong dan tanggung jawab sosial yang perlu diterapkan oleh para pemimpin dalam menghadapi tantangan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kontribusi sukarela pejabat eselon 3 ini, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk memberikan pendidikan kesehatan, nutrisi, dan perawatan yang diperlukan oleh anak-anak stunting. Langkah ini tidak hanya menciptakan dampak positif secara langsung pada anak-anak tersebut, tetapi juga menginspirasi masyarakat setempat untuk bersatu dan bersama-sama mengatasi masalah stunting. Semoga upaya seperti ini terus berkembang dan memberikan contoh bagi pihak-pihak lain untuk ikut serta dalam mengurangi tingkat stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Subang.



**Tabel 1.2 Data Status Gizi Tinggi Badan Menurut Umur (Tb/U) Di Kabupaten Subang
Tahun 2021**

NO	PUSKESMAS	JUMLAH ANAK	SANGAT PENDEK (STUNTING)	PENDEK (STUNTING)	JUMLAH STUNTING	CAKUPAN (%)
1	SAGALAHERANG	2.247	3	48	51	2,27
2	SERANGPANJANG	1.775	20	51	71	4,00
3	JALAN CAGAK	3.582	24	98	122	3,41
4	PALASARI	2.209	32	119	151	6,84
5	CISALAK	3.398	6	29	35	1,03
6	KASOMALANG	3.889	12	49	61	1,57
7	TANJUNGSANG	3.379	24	50	74	2,19
8	TANJUNGWANGI	1.623	9	19	28	1,73
9	CIRANGKONG	1.323	-	3	3	0,23
10	CIBOGO	3.549	9	32	41	1,16
11	SUKARAHAYU	5.012	4	35	39	0,78
12	CIKALAPA	3.328	51	49	100	3,00
13	KALIJATI	4.585	33	83	116	2,53
14	RAWALELE	2.770	10	58	68	2,45
15	CIPEUNDEUY	2.326	4	32	36	1,55
16	PABUARAN	2.375	5	8	13	0,55
17	PRINGKASAP	1.355	50	69	119	8,78
18	RANCABANGO	1.959	2	19	21	1,07
19	PATOKBEUSI	4.716	1	17	18	0,38
20	PURWADADI	1.905	-	10	10	0,52
21	CIKAUM	3.150	26	27	53	1,68
22	PAGADEN	2.346	3	4	7	0,30
23	GUNUNGSEMBUNG	1.109	-	25	25	2,25
24	PAGADEN BARAT	2.724	2	9	11	0,40
25	CIPUNAGARA	4.185	17	20	37	0,88
26	COMPREG	968	3	26	29	3,00
27	JATIREJA	1.405	26	88	114	8,11
28	BINONG	4.629	7	28	35	0,76
29	MARIUK/WANAJAYA	1.121	2	11	13	1,16
30	TAMBAKDAHAN	928	11	23	34	3,66
31	CIASSEM	2.135	12	71	83	3,89
32	JATIBARU	1.531	9	18	27	1,76
33	PAMANUKAN	3.640	77	159	236	6,48
34	BATANGSARI	1.720	-	6	6	0,35
35	MANDALAWANGI	1.144	9	1	10	0,87
36	PUSAKA NAGARA	3.520	31	95	126	3,58
37	KARANG ANYAR	2.412	8	11	19	0,79
38	LEGONKULON	1.454	-	41	41	2,82
39	BLANAKAN	1.911	-	2	2	0,10
40	CILAMAYA GIRANG	1.935	1	3	4	0,21
	JUMLAH	101.272	543	1.546	2.089	2,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Subang (Aplikasi e-PPGBM Kab. Subang bulan Agustus Tahun 2021

Pada tahun 2021, masalah stunting di Kabupaten Subang, menjadi perhatian serius, dan data diatas menunjukkan bahwa tingkat stunting tertinggi terjadi di

Kecamatan Pamanukan. Menurut laporan kesehatan yang dirilis, sebanyak 236 anak di Kecamatan Pamanukan mengalami kondisi stunting. Stunting, yang merupakan kondisi kronis akibat kekurangan gizi kronis pada masa pertumbuhan, dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik dan kognitif anak-anak.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kecamatan Palasari, di mana sebanyak 151 anak mengalami stunting. Hal ini menjadi perhatian karena stunting dapat memengaruhi kualitas hidup anak dan meningkatkan risiko penyakit kronis di masa dewasa. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang, akses terhadap layanan kesehatan, dan peran aktif dari pemerintah setempat dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini.

Nilai evaluasi lakip dinas kesehatan kabuapten subang 2022 menunjukkan sebagai berikut :

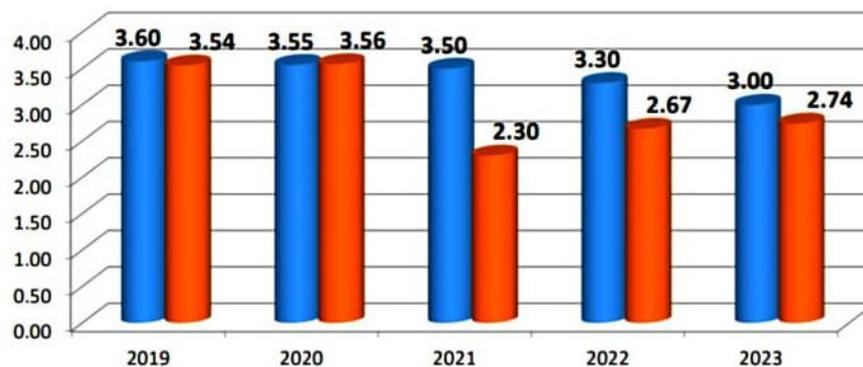
No.	Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	2022		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	Prevalensi Kurang Gizi	2.30	3.30	2.67	119.09	Tercapai

BANDUNG

Tercapainya Target Balita Kurang Gizi Tahun 2022 salah satu upaya yang dilakukan yaitu Pemberian Makanan Tambahan & Vitamin, termasuk PMT khusus untuk balita stunting dengan kurang gizi dari keluarga tidak mampu. Dari Segi pencapaian capaian kinerja tahun 2022 telah mencapai target karena dari target 3,30% Kabupaten Subang mencapai 2,67% tetapi apabila dibandingkan dengan data capaian kinerja tahun 2021 meningkat dari 2,30% menjadi 2,67% yaitu ada peningkatan sebesar 0,37%. Penyebab utama gizi kurang adalah kekurangan asupan

makanan yang bernutrisi sesuai kebutuhan masing-masing kelompok usia anak. Kekurangan asupan ini bisa terjadi karena tidak tersedianya bahan makanan yang berkualitas baik. Pandemi covid-19 yang berdampak besar terhadap keberlangsungan dan ketersediaan bahan makanan yang berkualitas baik menjadi salah satu penyebab langsung terjadinya peningkatan balita gizi kurang di Kabupaten Subang.

Jumlah Prevalensi Balita Kurang Gizi dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Grafik Prevalensi Stunting

Grafik diatas menggambarkan bahwa angka tertinggi balita kurang gizi terjadi pada tahun 2020 dan terdapat penurunan prevalensi balita kurang gizi dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Bila dibandingkan dengan ambang batas (17%) dan batas ambang masalah gizi masyarakat (10%), balita kurang gizi masih belum menjadi masalah gizi masyarakat.

Yang menjadi faktor pendorong tercapainya target indikator Prevalensi Balita Kurang Gizi di tahun 2023 adalah:

- a. Adanya Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang bersumber dari APBD Kabupaten merupakan faktor penting dalam menurunkan kasus kurang gizi/buruk (Wasting) pada balita. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sangat konsen dalam hal penanganan gizi buruk, hal ini terbukti di tahun 2022 Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita gizi buruk/gizi kurang sebesar Rp. 594.000.000 naik menjadi Rp. 723.600.000 pada tahun 2023.
- b. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam penurunan kasus gizi buruk (Wasting) pada balita adalah dampak tidak langsung dari standarisasi bentuk intervensi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), dimana pada tahun 2023 ini bentuk bantuan sudah di seragamkan yaitu pemberian 1 butir telur per hari, susu formula dan multivitamin untuk balita Stunting dan di bakukan melalui Surat Perintah Bupati.
- c. Meningkatnya kesadaran ibu tentang penting asupan bergizi untuk pertumbuhan dan kesehatan bayinya.

Strategi untuk mempertahankan capaian indikator Prevalensi Balita Kurang Gizi di Kabupaten Subang, antara lain:

- a. Intervensi gizi spesifik yaitu pemberian tablet tambah selama kehamilan; promosi dan konseling menyusui; promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak; pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK dan balita kurus; pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita.
- b. Intervensi gizi sensitif yaitu penyuluhan tentang pentingnya rumah tangga. memiliki akses air bersih dan sanitasi yang layak, penting mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional; tersedianya bantuan melalui BPNT dan PKH.
- c. Pemenuhan gizi yang optimal pada masa 1000 HPK yang dimulai sejak ibu hamil sampai anak usia 2 tahun.
- d. Melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan dan asupan bergizi kepada remaja di kelas 7 keatas, wanita sebelum melahirkan dan pada ibu hamil.

**Tabel 1.3 Data Status Gizi Tinggi Badan Menurut Umur (Tb/U) Di Kabupaten Subang
Tahun 2022**

NO	PUSKESMAS	JUMLAH ANAK	SANGAT PENDEK (STUNTING)	PENDEK (STUNTING)	JUMLAH STUNTING	CAKUPAN (%)
1	SAGALAHERANG	2.168	10	33	43	2,0
2	SERANGPANJANG	1.649	21	53	74	4,5
3	JALAN CAGAK	2.768	37	115	152	5,5
4	PALASARI	1.773	36	132	168	9,5
5	CISALAK	2.894	13	55	68	2,3
6	KASOMALANG	2.775	8	23	31	1,1
7	TANJUNGSANG	2.962	68	56	124	4,2
8	TANJUNGWANGI	1.637	10	21	31	1,9
9	CIRANGKONG	1.109	-	2	2	0,2
10	CIBOGO	3.485	7	25	32	0,9
11	SUKARAHAYU	4.096	16	46	62	1,5
12	CIKALAPA	2.625	19	82	101	3,8
13	KALIJATI	3.819	41	70	111	2,9
14	RAWALELE	2.600	15	31	46	1,8
15	CIPEUNDEUY	2.219	14	8	22	1,0
16	PABUARAN	2.349	3	16	19	0,8
17	PRINGKASAP	1.312	6	5	11	0,8
18	RANCABANGO	2.137	6	20	26	1,2
19	PATOKBEUSI	1.958	2	8	10	0,5
20	PURWADADI	3.292	6	3	9	0,3
21	CIKAUM	3.016	25	35	60	2,0
22	PAGADEN	2.327	30	58	88	3,8
23	GUNUNGSEMBUNG	1.572	9	13	22	1,4
24	PAGADEN BARAT	3.002	8	8	16	0,5
25	CIPUNAGARA	3.897	29	46	75	1,9
26	COMPRENG	879	7	13	20	2,3
27	JATIREJA	976	22	73	95	9,7
28	BINONG	3.407	5	18	23	0,7
29	MARIUK/WANAJAYA	1.086	2	8	10	0,9
30	TAMBAKDAHAN	977	-	-	-	-
31	CIASEM	3.904	15	27	42	1,1
32	JATIBARU	1.456	2	9	11	0,8
33	PAMANUKAN	3.457	131	6	137	4,0
34	BATANGSARI	1.697	1	3	4	0,2
35	MANDALAWANGI	1.103	6	2	8	0,7
36	PUSAKA NAGARA	2.551	6	10	16	0,6
37	KARANG ANYAR	2.437	11	34	45	1,8
38	LEGONKULON	1.447	5	17	22	1,5
39	BLANAKAN	2.234	2	2	4	0,2
40	CILAMAYA GIRANG	1.494	1	2	3	0,2
	JUMLAH	92.546	655	1.188	1.843	1,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Subang (Aplikasi e-PPGBM Kab. Subang bulan Agustus Tahun 2022)

Masalah stunting menjadi fokus utama kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Stunting, yang merupakan

masalah gizi kronis pada anak-anak, memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan mental. Data menunjukkan bahwa tingkat stunting paling tinggi tercatat di kecamatan Palasari, Kabupaten Subang. Peningkatan kesadaran dan aksesibilitas terhadap gizi yang baik menjadi landasan dalam upaya pencegahan stunting. Program pencegahan stunting harus merangkul pendekatan yang holistik, mencakup aspek-aspek seperti pendidikan gizi, aksesibilitas pangan bergizi, dan peran serta aktif komunitas dalam memahami pentingnya nutrisi seimbang.

Untuk mengatasi tingginya angka stunting di kecamatan Palasari, perlu langkah-langkah strategis seperti pendirian pusat kesehatan masyarakat, program pendidikan gizi di sekolah, dan kerjasama dengan sektor swasta serta organisasi non-pemerintah untuk pangan bergizi terjangkau. Kampanye edukasi melalui media massa, seminar, dan lokakarya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tindakan pencegahan stunting membutuhkan kerjasama erat antar sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam merancang kebijakan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memastikan solusi sesuai kebutuhan lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan pencegahan stunting dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan di kecamatan Palasari dan sekitarnya.

**Tabel 1.4 Data Status Gizi Tinggi Badan Menurut Umur (Tb/U) Di Kabupaten Subang
Tahun 2023 (Bpb Februari)**

NO	PUSKESMAS	JUMLAH ANAK	SANGAT PENDEK (STUNTING)	PENDEK (STUNTING)	JUMLAH STUNTING	CAKUPAN (%)
1	SAGALAHERANG	2.136	10	44	54	2,5
2	SERANGPANJANG	1.299	10	60	70	5,4
3	JALAN CAGAK	2.916	31	86	117	4,0
4	PALASARI	1.786	62	102	164	9,2
5	CISALAK	2.809	16	38	54	1,9
6	KASOMALANG	2.922	10	19	29	1,0
7	TANJUNGSANG	2.883	45	68	113	3,9
8	TANJUNGWANGI	1.524	5	8	13	0,9
9	CIRANGKONG	1.041	-	-	-	-
10	CIBOGO	3.139	-	9	9	0,3
11	SUKARAHAYU	4.069	26	57	83	2,0
12	CIKALAPA	2.511	32	83	115	4,6
13	KALIJATI	3.878	21	57	78	2,0
14	RAWALELE	2.726	13	29	42	1,5
15	CIPEUNDEUY	2.273	20	9	29	1,3
16	PABUARAN	2.818	2	8	10	0,4
17	PRINGKASAP	1.179	-	1	1	0,1
18	RANCABANGO	2.124	13	10	23	1,1
19	PATOKBEUSI	2.078	1	5	6	0,3
20	PURWADADI	3.285	1	-	1	0,0
21	CIKAUM	2.980	14	14	28	0,9
22	PAGADEN	2.379	6	7	13	0,5
23	GUNUNGSEMBUNG	1.419	7	14	21	1,5
24	PAGADEN BARAT	3.230	6	11	17	0,5
25	CIPUNAGARA	3.294	21	48	69	2,1
26	COMPRENG	897	27	24	51	5,7
27	JATIREJA	1.019	23	43	66	6,5
28	BINONG	3.022	-	-	-	-
29	MARIUK/WANAJAYA	839	6	4	10	1,2
30	TAMBAKDAHAN	888	-	-	-	-
31	CIASEM	4.569	18	30	48	1,1
32	JATIBARU	1.648	2	13	15	0,9
33	PAMANUKAN	3.073	46	72	118	3,8
34	BATANGSARI	1.560	1	3	4	0,3
35	MANDALAWANGI	1.190	6	4	10	0,8
36	PUSAKA NAGARA	2.417	5	16	21	0,9
37	KARANG ANYAR	2.315	15	32	47	2,0
38	LEGONKULON	1.285	24	36	60	4,7
39	BLANAKAN	1.909	5	1	6	0,3
40	CILAMAYA GIRANG	1.751	-	9	9	0,5
	JUMLAH	91.080	550	1.074	1.624	1,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Subang (Aplikasi e-PPGBM Kab. Subang Tahun 2023)

Tahun 2023 masih menunjukkan bahwa kecamatan Palasari tetap masalah stunting dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Subang. Dengan angka stunting

yang mencapai 164, keadaan ini menandakan bahwa tantangan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut masih memerlukan perhatian serius. Peningkatan angka stunting menjadi isu kritis yang harus segera diatasi agar generasi penerus dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Tahun 2023, Kabupaten Subang menghadapi tantangan stunting dengan 1624 kasus (prevalensi 1,8%). Angka ini menunjukkan risiko signifikan bagi pertumbuhan anak-anak, memerlukan tindakan strategis dari pemerintah dan Dinas Kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat ini. Stunting saat ini menjadi isu serius dengan dampak besar pada kecerdasan dan produktivitas generasi masa depan. Indonesia telah fokus mengatasi masalah ini dalam kebijakan kesehatannya. Menurut riset kesehatan, tingkat stunting balita Indonesia telah turun dari 37,2% pada 2013 menjadi 21,6% pada 2022, mengacu pada hasil SGGI (Budi G. Sadikin, 2021). SGGI menjadi indikator utama pengukuran stunting, dengan pemeriksaan data dilakukan setiap tahun sejak fokus pemerintah terhadap stunting.

Pemerintah memiliki optimisme untuk mencapai target angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024, dengan memperkuat regulasi stunting yang harus diperhatikan sejak masa kelahiran (Rokom, 2023). Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang diterbitkan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, menjadi dorongan pemerintah untuk memprioritaskan Tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi di pembangunan jangka menengah nasional (Irmada, 2021). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan dua jenis intervensi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik difokuskan pada

anak dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK), sedangkan intervensi sensitif melibatkan berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, seperti penyediaan air bersih, layanan kesehatan, dan penyuluhan gizi (Triyono, 2015).

Dilaksanakan program Kesehatan komprehensif dan terpadu untuk mencapai tingkat kesehatan optimal masyarakat, melibatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terintegrasi. Usaha kesehatan mencakup kegiatan individual dan komunitas dengan pendekatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemerintah meluncurkan Program BAAS sebagai upaya bersama untuk mengurangi stunting, terutama pada keluarga dengan risiko stunting, dengan partisipasi mitra dan pembentukan Tim Bapak Asuh Anak Stunting oleh Bupati Subang. Peluncuran program BAAS diikuti dengan Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 560.a/HL.01.01/G2/2022, tanggal 7 Juni 2022, yang mengajukan permohonan dan menghimbau mitra untuk menjadi bagian dari BAAS. Berdasarkan ini, Bupati Subang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PA.03.01/KEP.380-DP2KBP3A/2022 pada bulan Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Bapak Asuh Anak Stunting.

Di Subang, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menjadi garda terdepan Kelompok Penghambat Kecepatan Peningkatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) setempat. Tantangannya adalah bahwa penanganan hambatan memerlukan mediasi yang layak, setiap hari dan dapat diukur, sementara cadangan dibatasi, baik di tingkat provinsi maupun kota. Kendala lainnya adalah

porsi rencana keuangan untuk program-program yang seringkali dilaporkan sekitar pertengahan tahun, ketika rencana belanja pemerintah telah dikoordinasikan ke berbagai kegiatan. Oleh karena itu, rencana pengeluaran untuk memelihara persimpangan dan proyek-proyek eksplisit dibatasi atau hampir tidak ada. Permasalahan ini juga terjadi di wilayah Banten dalam pelaksanaan program kebutuhan masyarakat (Supriyanto dan Jannah, 2022).

Permasalahan lainnya mencakup target yang tidak tepat sasaran dan tidak adanya bantuan, sehingga program sering kali melambat atau gagal total tanpa hasil yang ideal. Pertanyaannya adalah, bagaimana persimpangan bergizi yang berfokus pada anak-anak kecil (yang menghambat) bisa berhasil di tengah-tengah cadangan yang terbatas, Bagaimana pengelolaan koperasi dapat dilaksanakan di tingkat kota agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh sasaran program.



Gambar 1.3 Pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)

Subang

Di Pemerintahan Subang, pelaksanaan Program BAAS mencakup dukungan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan setempat yang

diharapkan terlibat, dan salah satunya adalah menyemangati anak-anak yang menghadapi kesulitan atau kelaparan. Program ini mencakup seluruh jajaran, mulai dari Pejabat, pejabat eselon, hingga staf pelaksana. Setiap individu yang diutus sebagai ayah sementara diharapkan dapat mendistribusikan cadangan secara konsisten untuk memberikan makanan bergizi kepada keluarga yang menaunginya. Dilihat dari hasil pertemuan melalui beberapa informan, maka pelaksanaan Program BAAS sejalan dengan Pengumuman Pejabat Subang, seperti terlihat pada Gambar



Gambar 1.4 Pelaksanaan Program BAAS berdasarkan SK Bupati Subang

(Wijayanti, 2023) Program "Bapak Asuh Anak Stunting" (BAAS) di Kabupaten Subang merupakan inisiatif luar biasa yang diimplementasikan oleh pegawai golongan eselon III. Pelaksanaan program BAAS di Kabupaten Subang melibatkan berbagai pihak, Dinas Kesehatan sebagai leading sektornya. Dinas

Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan program ini di tingkat lokal. Mereka bekerja sama dengan para pegawai golongan eselon III dinas dinas lain nya, mengoordinasikan kegiatan, dan menyediakan dukungan teknis serta sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program ini secara efektif.

(Wijayanti, 2023) Menurut beberapa responden dari Kelompok Penghambat Penurunan Kecepatan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) di tingkat daerah dan kota, pelaksanaan BAAS dengan menggunakan teknik ini masih dipandang kurang efektif. Jumlah paket sembako sangat bergantung pada kapasitas dan kebutuhan. kemauan masing-masing ayah sementara, yang bisa berbeda-beda mulai dari satu ayah tidak tetap hingga ayah tidak tetap lainnya. Selain itu, jenis dan takaran makanan yang diberikan juga selalu bertentangan. Memberikan makanan mentah juga tidak sepenuhnya menjamin peningkatan berat dan tinggi badan anak. Beberapa kasus menunjukkan bahwa makanan dan susu yang seharusnya dikonsumsi oleh anak-anak yang memiliki tanda-tanda gangguan justru dimakan bersama seluruh keluarga, sehingga menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan asupan yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada prinsip pasti mengenai jenis makanan yang harus diberikan, dan tidak semua ayah sementara memiliki pemahaman yang cukup tentang kebutuhan sehat anak kecil.

Meskipun program BAAS telah diterapkan, tantangan yang dihadapi masih besar, terutama terkait angka stunting yang masih tinggi di wilayah kecamatan Tanjungsang yang khusus di pegang oleh dinas kesehatan kabupaten subang. Data statistik menunjukkan bahwa dari tahun 2021 ke 2022, kasus stunting mengalami

peningkatan yang signifikan, yaitu yang tadi nya 74 anak stunting naik menjadi 124 anak stunting. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menangani akar permasalahan stunting dan meningkatkan dampak positif dari program BAAS.

Kelemahan lain dari model BAAS ini melibatkan ketidakmampuan untuk mengontrol tingkat ketaatan dan disiplin keluarga sasaran dalam memberikan makanan yang bergizi. Selain itu, pendamping tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan harian ke rumah tangga sasaran. Mayoritas anak yang mengalami stunting merupakan bagian dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, di mana mayoritas ibu kerja di pabrik pabrik sejak pagi hingga sore, serta tanggung jawab pengasuhan anak diberikan kepada nenek ataupun anggota keluarga lainnya. Seringnya, fokus terhadap perkembangan anak juga kurang.

Berdasarkan pengamatan empiris Subjek penelitian yang diwawancara, program bantuan pemerintah saat pengadaan atau pemberian makanan sehat seringkali mengalami kegagalan atau tidak berkesinambungan. Salah satu contohnya, ketika memberikan beras fortifikasi kepada anak-anak gizi kurang, sebagian besar kelompok sasaran justru menjual beras yang diterima lalu membeli beras lain dengan harga lebih murah. Contoh lainnya adalah ketika bibit ikan dibagikan sebagai bagian dari program peningkatan asupan protein untuk rumah tangga, hasilnya adalah ikan tidak mendapat perawatan yang memadai sehingga banyak yang mati. Kejadian-kejadian seperti ini banyak terjadi karena kurangnya pengawasan serta pendampingan yang memadai.

Menurut unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang berperan sebagai garda terdepan dan mendukung Dinas Kesehatan dalam menjalankan program-programnya untuk mencapai masyarakat sasaran. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Subang, inisiatif BAAS mendorong para Bapak Asuh untuk memberikan pasokan bahan makanan mentah setiap bulannya. Sebelum diluncurkannya program BAAS, Kepala UPTD P5A telah memulai tindakan intervensi gizi pada anak balita stunting di beberapa Kecamatan. Intervensi ini melibatkan pemberian beras fortifikasi, bantuan penanaman sayuran di halaman, dan bantuan ikan untuk dibesarkan di kolam. Bantuan pangan dan ikan tersebut bertujuan guna mendukung penyediaan bahan makanan lokal yang kaya gizi. Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah periode dua bulan, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Juni 2022. Dana yang dialokasikan untuk melaksanakan program-program tersebut diperoleh melalui bantuan dari beberapa kantor Dinas Kabupaten Subang.

Di salah satu Kecamatan Kabupaten Subang, Program Bantuan BAAS terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan program ini, di mana bantuan bahan mentah yang seharusnya disalurkan langsung oleh petugas UPT justru diproses atau dikelola sendiri oleh Petugas UPT Setempat. Proses ini melibatkan kegiatan memasak bahan mentah menjadi makanan siap konsumsi. Bahan makanan atau uang dari bapak asuh dikumpulkan di tim pendamping kemudian Bahan-bahan tersebut dikirimkan ke dapur masak setempat. Meskipun niatnya baik karena khawatir tidak berdampak pada tujuan program BAAS, menimbang program sebelumnya masyarakat menjual kembali bahan mentah yang sudah diberikan,

adanya inisiatif ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi patologi birokrasi dalam pelaksanaan program. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan menjadi sorotan dalam konteks ini. Proses pengelolaan sendiri oleh UPT bisa membuka peluang terjadinya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan atau bahkan penyalahgunaan dana. Kekhawatiran ini muncul karena kurangnya pengawasan langsung dari pihak berwenang, seperti petugas di kecamatan yang seharusnya menjadi penyalur bantuan. Diperlukan mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan tanpa adanya penyimpangan.

Selain itu, aspek efektivitas program juga menjadi pertimbangan serius. Mengapa bahan mentah harus diolah sendiri oleh penerima bantuan, bukankah lebih efisien jika petugas di dinas kesehatan yang mengelola. Pertanyaan ini muncul karena pengolahan bahan mentah menjadi makanan siap saji bisa menimbulkan kerumitan logistik dan proses yang tidak terukur. Seharusnya, fokus program ini adalah memberikan dukungan kesehatan dan nutrisi kepada anak-anak stunting, bukan memasukkan elemen pengolahan bahan mentah yang dapat menghambat efisiensi pelaksanaan program.

Selain kendala-kendala yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat tantangan lain dalam pelaksanaan Program BAAS yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya gizi dan pola makan sehat di kalangan masyarakat sasaran. Tanpa pemahaman yang memadai, mungkin sulit bagi keluarga untuk mengoptimalkan manfaat bahan makanan yang diberikan oleh program. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih

lanjut dalam memberikan edukasi kepada keluarga sasaran, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan pola makan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan optimal anak-anak mereka.

Selanjutnya, evaluasi periodik terhadap dampak program juga menjadi krusial. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya intervensi, penting untuk mengukur sejauh mana program ini berhasil mengurangi tingkat stunting di masyarakat sasaran. Evaluasi ini bukan hanya sebatas pada jumlah bahan makanan yang disalurkan, tetapi juga perubahan-perubahan perilaku dan peningkatan status gizi anak-anak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hasil program, pihak terkait dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat lokal juga perlu diperkuat. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan efektivitasnya. Dengan melibatkan komunitas lokal, program dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta realitas setempat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan program.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dari itu penulis mengidentifikasi masalah yang terurai dalam point-point sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman dan pelaksanaan program oleh pihak terkait.
- 2) Tidak adanya pemantauan dan evaluasi yang sistematis terhadap capaian program.
- 3) Anggaran yang tidak memadai untuk mendukung kegiatan dan pelaksanaan program.
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program ini.
- 5) Kurangnya informasi yang tersedia untuk masyarakat terkait program Bapak Asuh Anak Stunting.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari Penelitian ini Sebagai Berikut :

- 1) Bagaimana Efektivitas Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023 ?
- 2) Bagaimana Efisiensi Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023 ?
- 3) Bagaimana Kecukupan Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023 ?
- 4) Bagaimana kesamaan/perataan Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023 ?

- 5) Bagaimana Responsivitas Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023 ?
- 6) Bagaimana ketepatan Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk Mengetahui Efektivitas Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023.
- 2) Untuk Mengetahui Efisiensi Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023.
- 3) Untuk Mengetahui Kecukupan Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023.
- 4) Untuk Mengetahui kesamaan/perataan Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023.
- 5) Untuk Mengetahui Responsivitas Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023.
- 6) Untuk Mengetahui Kriteria ketepatan Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik, khususnya dalam konteks teori evaluasi kebijakan.
- b. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan referensi penting untuk penelitian masa depan yang terkait dengan evaluasi kebijakan pencegahan stunting, serta memotivasi kajian lanjutan dalam bidang ini.

2. Aspek Praktis

1. Bagi Peneliti

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang bermanfaat ketika nanti terlibat dalam masyarakat terkait dengan aspek yang relevan dengan penelitian **EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023**
2. Penelitian ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Bagi Pemerintah

- A. Harapannya, penelitian ini dapat menyediakan informasi yang dapat menjadi kontribusi penting serta pertimbangan berharga bagi instansi yang berperan dalam usaha pencegahan stunting.

B. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berguna bagi instansi yang relevan dalam merancang program pencegahan stunting di masa depan.

3. Bagi Masyarakat

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas pencegahan stunting.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran serta informasi kepada masyarakat terkait dengan teori evaluasi kebijakan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Evaluasi program umumnya melibatkan serangkaian langkah khusus, baik sebelum program dimulai, selama pelaksanaan, maupun setelah program dijalankan, dengan membandingkan situasi aktual dengan harapan awal terkait program tersebut. Menyelam dalam proses evaluasi menjadi hal yang penting untuk mengidentifikasi tujuan atau kondisi yang diharapkan, dan membandingkannya dengan pencapaian sebenarnya, sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara menyeluruh.

Dalam menilai evaluasi, penting untuk mempertimbangkan bahwa proses ini tidak selalu mengubah rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu, sebuah evaluasi dianggap efektif ketika program telah diberi tujuan yang konkret sehingga hasil yang dicapai dapat didefinisikan dengan jelas.

Evaluasi kebijakan diartikan sebagai penfokusan pada kinerja kebijakan dan program tertentu. Jenis evaluasi menitikberatkan pada aspek kejujuran dan efisiensi

dalam pelaksanaan program. Menurut Abdul Halim (2012: 31), pendekatan Pendekatan kinerja dalam pengelolaan keuangan adalah suatu sistem keuangan yang memprioritaskan usaha untuk mencapai hasil kerja (output) dari alokasi biaya (input) yang telah ditentukan.

Tulisan ini memusatkan perhatian pada pelaksanaan “EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023”. Evaluasi Kebijakan Publik dalam studi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk menilai apakah suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Evaluasi pada suatu program atau kebijakan dapat melibatkan beberapa metode yang berbeda, yang tentu saja akan memengaruhi kriteria yang digunakan, di antaranya:

- a) Pendekatan berdasarkan kerangka nilai yang diacu;
- b) Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi;
- c) Pendekatan berdasarkan kriteria penilaian.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sudah mengimplementasikan banyak kebijakan dan program kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan program bapak asuh anak (BAAS). Selanjutnya dalam mencegah stunting ini Pemerintah

telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yang merinci strategi percepatan penurunan stunting sebesar 14%. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan target bahwa prevalensi stunting harus berkurang sebesar 2,7% setiap tahunnya untuk mencapai angka yang diinginkan pada tahun 2024 mendatang. (presidenri.go.id, 2021).

Pemerintah juga gencar melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan gizi yang cukup. Kebijakan ini mencakup pendekatan holistik yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian untuk memastikan akses masyarakat terhadap makanan bergizi.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan di daerah-daerah yang rentan terhadap stunting. Program peningkatan aksesibilitas ini mencakup pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, serta promosi pola hidup sehat. Dalam kerangka ini, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan stunting. Dengan kombinasi kebijakan dan kerjasama lintas sektor ini, pemerintah berharap dapat mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Evaluasi Program Menurut Dunni (2000:608) mempunyai implikasi yang berkaitan, yang masing-masing menunjukkan penggunaan beberapa skala penilaian terhadap strategi dan hasil program. Sebagai aturan umum, istilah penilaian dapat disamakan dengan pemeriksaan, pemeringkatan dan evaluasi, kata-kata yang

mengungkapkan upaya untuk memecah strategi menghasilkan istilah unit-unit yang bernilai signifikan. Dalam pengertian yang lebih jelas, penilaian dihubungkan dengan penciptaan. memberikan data sehubungan dengan nilai atau keuntungan dari hasil strategi. Ketika hasil strategi benar-benar memiliki nilai, hal ini karena hasil tersebut menambah tujuan atau target. Dalam situasi ini, dapat dikatakan bahwa strategi program telah mencapai tingkat pelaksanaan yang signifikan, dan hal ini berarti permasalahan strategi telah diklarifikasi atau diselesaikan.

Berdasarkan penelitian awal, penulis menemukan adanya permasalahan ataupun hambatan dalam menjalankan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Di kabupaten Subang. Terkait dengan faktor penghambat di dalamnya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Subang tersebut, penulis menemukan adanya indikasi masalah mengenai evaluasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Di Kabupaten Subang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Dunn (1994) sebagaimana yang dijelaskan dalam Dasar-Dasar Kebijakan Publik oleh Leo Agustino, Ph.D (2019: 176-177). Teori tersebut menyatakan bahwa evaluasi kebijakan atau program dapat diukur dengan mempertimbangkan beberapa kriteria evaluasi, antara lain:

1. Efektivitas (*effectiveness*), yang berkaitan dengan pencapaian hasil dari suatu alternatif. (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Efektivitas dalam penelitian ini, membahas mengenai pencapaian tujuan program bapak asuh anak dalam pencegahan stunting di Kabupaten Subang.

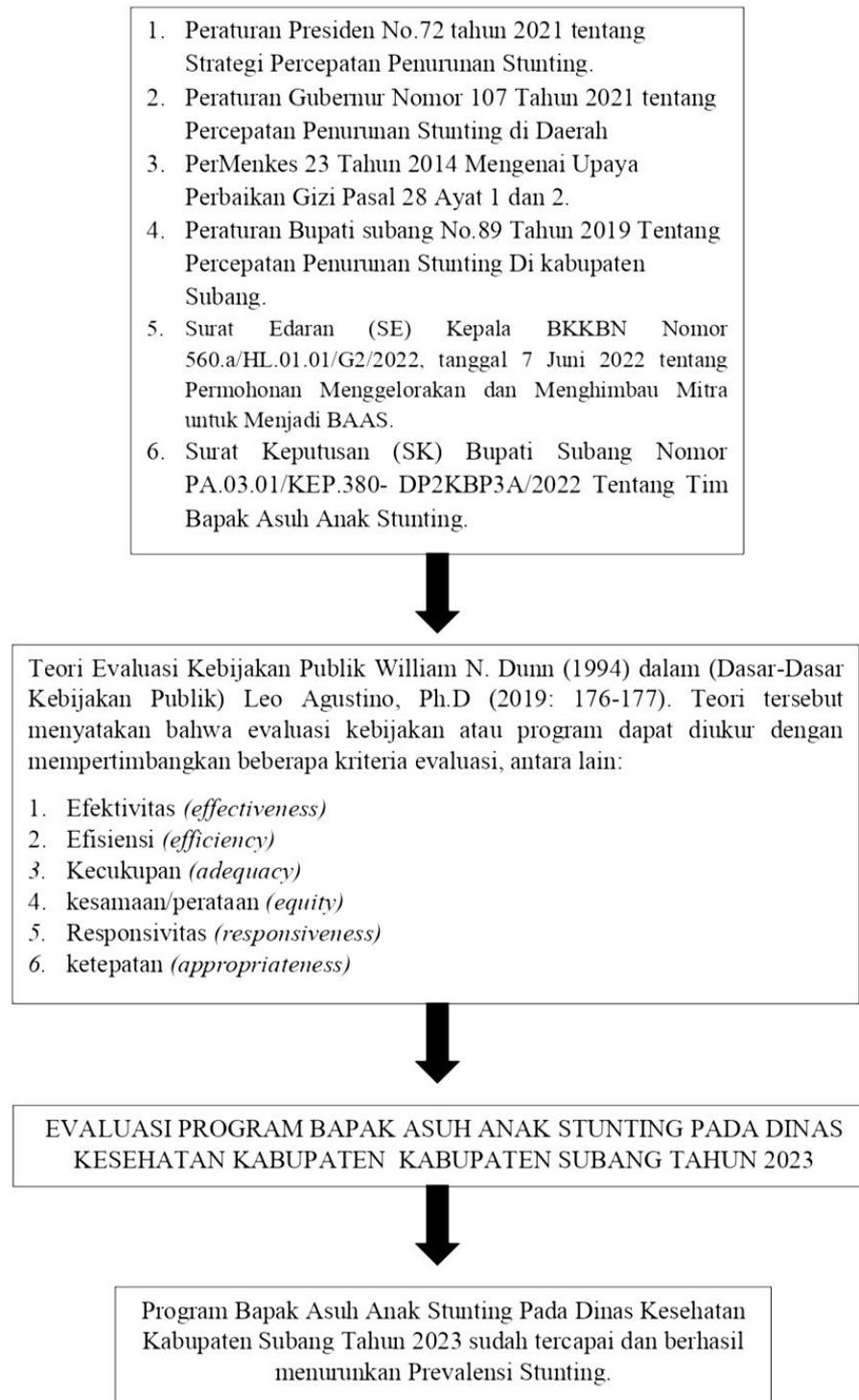
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. Efisiensi pada penelitian ini mengarah pada jumlah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dikeluarkan untuk melaksanakan program.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan pada penelitian ini mengarah pada pencapaian program dan kaitannya dengan pemecahan masalah, dan apakah alternatif pemberian bantuan telah cukup untuk mengatasi kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Subang.
4. Kriteria kesamaan/perataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat. Perataan dalam penelitian ini

membahas tentang distribusi informasi program (sosialisasi program) dan distribusi program kepada kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang memiliki anak di Kabupaten Subang.

5. Responsivitas (*responsiveness*) menyangkut sejauh mana kebijakan atau program dapat memenuhi preferensi, kebutuhan, dan nilai kelompok masyarakat di Kabupaten Subang.
6. Kriteria ketepatan (*appropriateness*) erat kaitannya menggunakan rasionalitas substantif, sebab pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak hanya berfokus pada satuan kriteria individu, melainkan lebih pada dua atau lebih kriteria yang dinilai bersama-sama. Ketepatan mengacu pada nilai atau signifikansi dari tujuan program dan pada dasar-dasar yang kuat yang mendasari tujuan tersebut.

Dari penjelasan di atas, kerangka pemikiran yang disusun dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :





Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran Evaluasi Program Bapak Asuh Anak Stunting Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Subang Tahun 2023

Sumber : Diolah Peneliti 2024